FRAMEWORK
POHON KINERJA
TABEL POHON KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja
Telp. (0362) 3301977
e-mail: bpkpd@bulelengkab.go.id
website: www.bpkpd.bulelengkab.go.id

NO	KINERJA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KET
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penilaian dari BPK	
1.1	Terwujudnya penyusunan anggaran daerah	Persentase penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu	Jumlah penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu dibagi jumlah penyusunan anggaran daerah dikali seratus	
1.1.1	Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS	
1.1.2	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD memperoleh Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD memperoleh Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
1.1.3	Tersusunnya bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
1.1.4	Tersusunnya laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran	
1.2	Meningkatnya pelayanan perbendaharaan daerah yang baik	Persentase pelayanan perbendaharaan daerah	Jumlah pelayanan perbendaharaan daerah yang baik dibagi jumlah pelayanan perbendaharaan dikali seratus	
1.2.1	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen BKU BUD yang terbit	Jumlah Dokumen BKU BUD yang terbit	
1.2.2	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1.2.3	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
1.2.4	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

NO	KINERJA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KET
1.2.5	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
1.2.6	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
1.2.7	Terlaksananya pencairan SP2D belanja SKPD tepat waktu	Jumlah laporan pencairan SP2D tepat waktu	Jumlah laporan pencairan SP2D tepat waktu	
1.2.8	Terlaksana Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan SKPD	
1.3	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	
1.3.1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
1.3.2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
1.3.3	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen draf Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen draf Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
1.3.4	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah	
1.3.5	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	

NO	KINERJA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KET
1.3.6	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
1.3.7	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	Jumlah BMD yang dikelola dengan baik dibagi Jumlah BMD yang dikelola dikali 100%	
2.1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah BMD yang dikelola dengan baik dibagi Jumlah BMD yang dikelola dikali 100%	
2.1.1	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
2.1.2	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
2.1.3	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.1.4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	
2.1.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	
2.1.6	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	
2.1.7	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.1.8	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	
2.1.9	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik	
2.1.10	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah yang diusulkan tepat waktu	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah yang diusulkan tepat waktu	

NO	KINERJA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KET
3	Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	Jumlah realisasi PAD	
3.1	Terwujudnya pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Pendataan PAD, Persentase Pelayanan PAD, dan Persentase Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah	Persentase Pendataan PAD, Persentase Pelayanan PAD, dan Persentase Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah	
3.1.1	Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	
3.1.2	Tersedianya Data Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Wajib Pajak Daerah	
3.1.3	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah t	Jumlah Laporan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah tepat waktu	
3.2.	Terwujudnya penagihan dan evaluasi pendapatan daerah	Persentase penagihan pajak daerah dan evaluasi pendapatan daerah	Persentase penagihan pajak daerah dan evaluasi pendapatan daerah	
3.2.1	Tersedianya data kepatuhan wajib pajak	Jumlah laporan analisa resiko dan evaluasi pelaporan pajak daerah	Jumlah laporan analisa resiko dan evaluasi pelaporan pajak daerah	
3.2.2	Terlaksananya Pelayanan atas Keberatan dan Pengurangan nilai Pajak Daerah	Jumlah laporan pelayanan keberatan dan pengurangan nilai pajak tepat waktu	Jumlah laporan pelayanan keberatan dan pengurangan nilai pajak tepat waktu	
3.2.3	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	Jumlah Laporan Data Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Data Pemeriksaan Pajak Daerah	
3.2.4	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	
3.2.5	Terlaksananya pemungutan piutang pajak daerah	Jumlah Laporan Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah, Surat Teguran, Tagihan Denda, Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah, Surat Teguran, Tagihan Denda, Realisasi Pajak Daerah	

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610830 198901 1 001

POHON KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

Tujuan ke-8 :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas : ***Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan,*** **Pendapatan dan Aset Daerah**

MASALAH / ISU :
1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah modul Keuangan Daerah masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi;
2. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
3. Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. Belum optimalnya identifikasi aset pemerintah daerah.

Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Indikator :
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran :
Terwujudnya PAD yang sesuai target

Indikator :
Jumlah realisasi PAD

Sasaran :
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas

Indikator :
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Sasaran :
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas

Indikator :
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik

Sasaran :
Terwujudnya pendataan dan pelayanan pendapatan daerah

Indikator :
1. Persentase pendataan PAD
2. Persentase pelayanan PAD
3. Persentase dokumen kebijakan pendapatan

Sasaran : Terwujudnya penagihan dan evaluasi pendapatan daerah

Indikator :
1. Persentase penagihan pajak daerah
2. Persentase evaluasi pendapatan daerah

Sasaran :
Terwujudnya penyusunan anggaran daerah

Indikator :
Persentase penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu

Sasaran :
Meningkatnya pelayanan perbendaharaan daerah yang baik.

Indikator :
Persentase pelayanan perbendaharaan daerah

Sasaran :
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu

Indikator :
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu

Sasaran :
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas

Indikator :
Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik

Sasaran: Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Indikator: Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Sasaran: Tersedianya Data Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator: Jumlah Laporan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sasaran: Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator: Jumlah Laporan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah tepat waktu

Sasaran: Tersedianya data kepatuhan wajib pajak

Indikator : Jumlah laporan analisa resiko dan evaluasi pelaporan pajak daerah

Sasaran: Terlaksanya Pelayanan atas Keberatan dan Pengurangan nilai Pajak Daerah

Indikator: Jumlah laporan pelayanan keberatan dan pengurangan nilai pajak tepat waktu

Sasaran: Terlaksanya pemeriksaan pajak daerah

Indikator: Jumlah Laporan Data Pemeriksaan Pajak Daerah

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah

Indikator : Jumlah Laporan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah

Sasaran: Terlaksanya pemungutan piutang pajak daerah

Indikator: Jumlah Laporan Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah, Surat Teguran, Tagihan Denda, Realisasi Pajak Daerah

Sasaran: Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS

Sasaran: Terlaksanya Pembinaan Pengangaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah SKPD memperoleh Pembinaan Pengangaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sasaran: Tersusunnya bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Indikator : Jumlah Laporan bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sasaran: Tersusunnya laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran

Indikator : Jumlah Laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran

Sasaran: Terlaksanya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen BKU BUD yang terbit

Sasaran: Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sasaran: Terlaksanya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Sasaran: Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sasaran: Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Sasaran: Tersediannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan

Sasaran: Terlaksanya pencairan SP2D belanja SKPD tepat waktu

Indikator: Jumlah laporan pencairan SP2D tepat waktu

Sasaran: Terlaksana Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah laporan hasil pembinaan SKPD

Sasaran : Terlaksanya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Sasaran : Terlaksanya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Sasaran : Terlaksanya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen draf Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sasaran : Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Indikator : Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah

Sasaran : Terlaksanya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Sasaran : Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sasaran : Terlaksanya Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Sasaran : Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sasaran : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sasaran : Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran : Terlaksanya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sasaran : Terlaksanya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sasaran : Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

Sasaran : Terlaksanya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran : Tersedianya Standar Harga

Indikator : Jumlah Standar Harga yang Disusun

Sasaran : Terlaksanya Pengamanan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah

Sasaran : Terlaksanya Penilaian Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah yang diusulkan tepat waktu

Singaraja, 2 Januari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Suhartha Widiada, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680802 198901 1 001